



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 56 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
(RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2012  
WALIKOTA KEDIRI,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan satu kesatuan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan, sehingga antara program dan kegiatan dalam RKPD selaras dengan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2012, maka dipandang perlu untuk merubah Perwali Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010-2014.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/3722/SJ tanggal 28 September 2011 tentang Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2012

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2012 diubah sebagai berikut :

1. Bab I Dasar Hukum angka 1, angka 8 dan angka 9 diubah dan ditambah angka baru yaitu 10 dan angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Undang - Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
  11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2012.
2. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan halaman 46 sampai dengan halaman 64 point 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut :

#### **3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dan diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya.

Konsekuensi pemberian kewenangan bagi daerah adalah bahwa daerah harus siap menerima tanggung jawab untuk

mengatur dan memanfaatkan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Kediri sebagai daerah otonom wajib untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan cara memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada, dengan demikian sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah menjadi Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Kota Kediri menganut anggaran Surplus/Defisit.

Pada Tahun 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kediri mengalami defisit sebesar Rp.43.000.000.000,00 dengan perincian :  
Pendapatan Daerah sebesar Rp.757.175.813.059,12 dan Belanja Daerah sebesar Rp.800.175.813.059,12. Adanya defisit dimaksud ditutup dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.43.000.000.000,00 yang berasal dari Estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2011 sebesar Rp.45.000.000.000,00 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00.

Perkiraan Pendapatan Daerah pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp.757.175.813.059,12 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.94.663.768.282,19, Dana Perimbangan dari Pemerintah sebesar Rp.569.671.928.953,40 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.92.840.115.823,53.

Pada Tahun 2012 proyeksi belanja sebesar Rp.800.175.813.059,12 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.447.266.064.210,47 serta Belanja Langsung sebesar Rp.352.909.748.848,65.

Sedangkan proyeksi pada pos Pembiayaan Daerah pada

Tahun 2012, terdiri dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp.45.000.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan optimal, maka perlu ditetapkan arah kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

#### **3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka kebijakan pendapatan daerah yang diambil antara lain :

1. Meningkatkan target PAD dengan selalu mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan perUndang - Undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan dan mengelola PAD dengan cara mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima serta tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
3. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.

Dalam sistem pengelolaan anggaran daerah harus diperhatikan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari PAD. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri antara lain :

1. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui :
  - a). Melanjutkan up-dating dalam rangka pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak serta retribusi daerah melalui sistem komputerisasi terhadap wajib pajak dan retribusi.
  - b). Pembenahan manajemen pemungutan dengan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel sehingga dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi.
  - c). Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat khususnya yang terkait langsung dengan retribusi sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
  
2. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara :
  - a). Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
  - b). Optimalisasi pemanfaatan asset daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
  
3. Meningkatkan sistem pengendalian, pengawasan sistem pungutan dan kesejahteraan pegawai sehingga tingkat kebocoran pungutan Pendapatan Asli Daerah dapat diminimalkan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka dalam rangka membiayai rencana pembangunan daerah, sumber utama penerimaan anggaran daerah Pemerintah Kota Kediri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Sedangkan dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2009 sampai tahun 2012 sesuai dengan tabel berikut :

**Tabel 3.7**

## Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Kediri

Tahun 2009-2012

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	PAGU INDIKATIF TAHUN 2012
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>88,849,647,034.61</b>	<b>92,690,243,448.64</b>	<b>88,275,238,174.00</b>	<b>94.663.768.282,19</b>
-	Pajak Daerah	14,237,388,734.00	16,923,398,116.00	17,461,000,000.00	20.397.843.709,80
-	Retribusi Daerah	10,494,169,558.34	9,986,977,217.94	9,214,171,727.00	8.213.801.227,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,165,745,481.36	1,212,138,061.13	1,462,400,000.00	1.184.929.133,96
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	62,952,343,260.91	64,567,730,053.57	60,137,666,447.00	64.867.194.211,43
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>519,568,288,310.00</b>	<b>516,442,210,171.00</b>	<b>482,799,495,953.40</b>	<b>569.671.928.953,40</b>
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	83,061,626,310.00	93,748,860,171.00	78,876,065,953.40	78.876.065.953,40
-	Dana Alokasi Umum	408,246,662,000.00	421,789,650,000.00	399,397,630,000.00	490.371.763.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	28,260,000,000.00	903,700,000.00	4,525,800,000.00	424.100.000,00
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>63,812,236,081.00</b>	<b>107,392,843,979.00</b>	<b>94,441,452,137.12</b>	<b>92.840.115.823,53</b>
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	34,226,916,081.00	38,408,877,979.00	34,466,381,137.12	34.051.044.823,53
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	16,832,805,000.00	58,668,896,000.00	58,789,071,000.00	58.789.071.000,00
-	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	12,752,515,000.00	10,315,070,000.00	1,186,000,000.00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>672.230.171.425,61</b>	<b>716.525.297.598,64</b>	<b>665.516.186.264,52</b>	<b>757.175.813.059,12</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Kota Kediri

**1. Pendapatan Asli Daerah**

Pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri terealisasi sebesar Rp.92.690.243.448,64 atau 4% dari tahun 2009 yang terealisasi sebesar Rp.88.849.647.034,61. Peningkatan tersebut terdapat pada pos pendapatan dari pajak daerah, hasil pengelolaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Proyeksi pada tahun 2012 mengalami kenaikan 7,24% atau sebesar

Rp.94.663.768.282,19 dari target tahun 2011 sebesar Rp.88.275.238.174,00. Hal ini disebabkan asumsi pendapatan pada pos pajak daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan, sedangkan pada retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah mengalami penurunan, ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan dalam mendukung penerimaan daerah sehingga perlu lebih diintensifkan dan diharapkan masa yang akan datang kemandirian secara finansial dapat terwujud. Adapun komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **1.1. Pajak Daerah**

Realisasi pajak daerah pada tahun 2010 meningkat sebesar 18,86% atau Rp.16.923.398.116,00 dari tahun 2009 sebesar Rp.14.237.388.734,00. Target pajak daerah pada tahun 2011 sebesar Rp.17.461.000.000,00 atau meningkat 3,18% dari target tahun 2010. Sedangkan proyeksi tahun 2012 sebesar Rp.20.397.843.709,80 atau meningkat 16,82% dari tahun 2011 sebesar Rp.17.461.000.000,00. Target pajak daerah yang paling besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri adalah Pajak Penerangan Jalan yang kontribusinya sebesar 51,14% dari seluruh total target pendapatan pajak

daerah tahun 2011. Secara detail Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.8**  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun 2009-2012

<b>NO</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Realisasi Tahun 2009</b>	<b>Realisasi Tahun 2010</b>	<b>Proyeksi Tahun 2011</b>	<b>Proyeksi Tahun 2012</b>
1	Pajak Hotel	1.203.044.594,00	1,427,474,370.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
2	Pajak Restoran	1.500.926.970,00	2,176,694,579.00	1,735,500,000.00	1,750,500,000.00
3	Pajak Hiburan	425.413.635,00	488,433,777.00	388,500,000.00	405,500,000.00
4	Pajak Reklame	1.034.680.542,00	1,300,062,130.00	1,135,000,000.00	1,085,000,000.00
5	Pajak Penerangan Jalan	9.936.682.993,00	11,391,401,260.00	10,477,000,000.00	10,431,843,709.80
6	Pajak Parkir	136.640.000,00	139,332,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
7	Pajak Air Tanah	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
8	Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00
9	BPHTB	0.00	0.00	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
<b>J U M L A H</b>		<b>14.237.388.734,00</b>	<b>16,923,398,116.00</b>	<b>17,461,000,000.00</b>	<b>20,397,843,709.80</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri

## 1.2. Retribusi Daerah

Tahun 2009 jumlah realisasi retribusi daerah sebesar Rp.10.494.169.558,34 dan pada tahun 2010 turun 4,83% dari tahun 2009 atau sebesar Rp.9.986.977.217,94. Untuk Rencana penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp.8.213.801.227,00 atau mengalami penurunan sebesar 10,86% dari jumlah proyeksi retribusi tahun 2011 sebesar Rp.9.214.171.727,00. Realisasi serta perkiraan jenis-jenis retribusi sesuai dengan tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan retribusi daerah**  
**Tahun 2009-2012**

No	Jenis Retribusi	Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Proyeksi Tahun 2011	Proyeksi Tahun 2012
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.105.758.574,34	1,225,654,883.94	1,185,289,500.00	558,922,500.00
2	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	3.848.620.200,00	4,075,739,375.00	3,967,760,000.00	3,967,760,000.00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	345.340.000,00	572,500,000.00	652,925,000.00	572,565,000.00
4	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	301.937.500,00	356,980,000.00	521,335,000.00	521,335,000.00
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat	10.407.000,00	12,517,500.00	17,500,000.00	17,500,000.00
6	Ret. Penggantian biaya KTP & Akta Catatan Sipil	384.582.000,00	178,553,500.00	175,000,000.00	170,000,000.00
7	Retribusi Pelayanan Pasar	2.284.768.500,00	608,742,000.00	0.00	0.00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	134.443.444,00	136,835,818.00	121,503,677.00	117,447,677.00
9	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	163.144.948,00	155,525,925.00	151,613,050.00	129,901,050.00
10	Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	107.670.100,00	130,682,000.00	88,678,500.00	91,416,000.00
11	Retribusi Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	417.430.750,00	455,063,000.00	541,820,000.00	608,707,000.00
12	Retribusi Terminal	138.661.600,00	181,703,200.00	224,509,500.00	224,509,500.00
13	Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus	2.760.000,00	3,180,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
14	Retribusi Jasa Usaha tempat Potong Hewan	107.057.000,00	146,922,500.00	148,907,500.00	148,907,500.00
15	Retribusi Distribusi Pelayanan Obat	7.500.000,00	6,500,000.00	4,000,000.00	0.00
16	Retribusi izin Penyelenggaraan Upaya Kesehatan	5.775.000,00	11,845,000.00	7,000,000.00	0.00
17	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	827.614.427,00	1,288,316,821.00	1,072,030,000.00	1,072,030,000.00
18	Retribusi Ijin Trayek	6.423.500,00	5,624,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
19	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	176.709.915,00	330,354,195.00	300,000,000.00	0.00
20	Retribusi Perijinan Bidang Industri dan Perdagangan	52.050.100,00	64,250,000.00	0.00	0.00
21	Retribusi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah	28.050.000,00	9,637,500.00	0.00	0.00
22	Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	26.400.000,00	25,350,000.00	21,500,000.00	0.00
23	Retribusi izin pariwisata	11.075.000,00	4,500,000.00	0.00	0.00
<b>J U M L A H</b>		<b>10.494.169.558,34</b>	<b>9,986,977,217.94</b>	<b>9,214,171,727.00</b>	<b>8,213,801,227.00</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri

Pada tahun 2012, penyumbang terbesar dari target penerimaan retribusi daerah adalah Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum yaitu sebesar 48,31% dari total penerimaan retribusi atau sebesar Rp.3.967.760.000,00 yang disebabkan adanya kenaikan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Kota Kediri serta meningkatnya tingkat kunjungan kendaraan yang bernomor polisi luar Kota Kediri. Sedangkan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi toko, Retribusi izin distribusi pelayanan obat, Retribusi izin penyelenggaraan upaya kesehatan, Retribusi Ijin Gangguan/ Keramaian dan Retribusi izin usaha jasa konstruksi/IUJK mengalami penurunan, serta retribusi pelayanan pasar nihil.

### **1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat 3,00% pada tahun 2010 atau sebesar Rp.1.212.138.061,13 dari tahun 2009 yang terealisasi sebesar Rp.1.165.745.481,36 Target tahun 2011 sebesar Rp.1.462.400.000,00 sedangkan proyeksi tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp.1.184.929.133,96 Jika dibanding

dengan tahun 2011 mengalami penurunan 18,97% atau sebesar Rp.277.470.866,04. Realisasi dan proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
Realisasi dan Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
Tahun 2009-2012

No	Jenis Investasi/ Nama Perusahaan	Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Proyeksi Tahun 2011	Proyeksi Tahun 2012
1	Dana Bergulir Koperasi	115.000.000,00	282,390,000.00	0.00	0.00
2	PDAM	300.000.000,00	506,000,000.00	575,000,000.00	600,000,000.00
3	BPR Kota Kediri	351.872.071,00	0.00	380,000,000.00	0.00
4	Bank Jatim	317.237.410,36	392,586,061.13	397,500,000.00	475,029,133.96
5	BPR Jatim	27.636.000,00	31,162,000.00	34,900,000.00	34,900,000.00
6	PD. Pasar	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>1.165.745.481,36</b>	<b>1,212,138,061.13</b>	<b>1,462,400,000.00</b>	<b>1,184,929,133.96</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri

Pada tahun 2012, jika dilihat dari jenis penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, kontribusi terbesar adalah dari penerimaan PDAM Kota Kediri yaitu sebesar 50,64% dari total penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah atau sebesar Rp.600.000.000,00.

#### 1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komponen penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan denda retribusi, fasilitas umum,

penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito dan penerimaan lain-lain, Pendapatan BLUD, serta Hasil lelang sewa bekas tanah kas desa. Realisasi dan target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.11**

**Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

No .	Uraian	Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Proyeksi Tahun 2011	Proyeksi Tahun 2012
1	Hasil penj. Aset daerah yang tdk dipisahkan	132,953,000.00	58,950,000.00	139,442,350.00	86,950,000.00
2	Pendapatan Denda retribusi	117,810,500.00	99,250,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
3	Fasilitas Umum	174,420,700.00	182,396,200.00	189,463,800.00	128,609,000.00
4	Penerimaan Jasa Giro	5,165,956,989.78	2,264,290,315.00	3,000,000,000.00	2,243,686,007.98
5	Pendapatan Bunga Deposito	4,038,210,561.68	4,736,917,808.15	4,050,000,000.00	5,845,370,547.85
6	Penerimaan Lain	9,468,773,095.45	4,304,438,519.33	110,484,000.00	160,116,174.60
7	Pendapatan BLUD	42,663,269,549.00	50,140,406,356.00	50,171,093,947.00	52,849,306,556.00
8	Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir	0.00	0.00	150,000,000.00	90,000,000.00
9	Hasil lelang sewa bekas tanah kas desa	1,190,948,865.00	2,781,080,855.00	2,231,182,350.00	3.367.155.925.00
<b>Jumlah</b>		<b>62,952,343,260.91</b>	<b>64,567,730,053.48</b>	<b>60,137,666,447.00</b>	<b>64.867.194.211,43</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri

Total realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2010 sebesar Rp.64.567.730.053,48 atau meningkat sebesar 2,5% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp.62.952.343.260,91. Untuk tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp.64.867.194.211,43 atau meningkat 7,29% dari target tahun 2011 sebesar Rp.60.137.666.447,00. Peningkatan berasal dari penerimaan pendapatan bunga deposito, dan

pendapatan BLUD.

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber dana yang diperoleh agar dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Pada tahun 2010 jumlah realisasi dana perimbangan sebesar Rp.516.442.210.171,00, menurun sebesar 0,60% dari tahun 2009 yang terealisasi sebesar Rp.519.568.288.310,00. Sedangkan proyeksi penerimaan dana perimbangan tahun 2011 diproyeksikan sebesar Rp.482.799.495.953,40.

Pada tahun 2012 Jumlah dana perimbangan diperkirakan meningkat 15,25% dibanding tahun 2011 yaitu sebesar Rp.569.671.928.953,40. Adapun realisasi dan proyeksi dana perimbangan sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.12**

### Realisasi dan Proyeksi Dana Perimbangan

NO	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012
1.	<b>Dana Perimbangan</b>				
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	83.061.626.310,00	93.748.860.171,00	78.876.065.953,40	78.876.065.953,40
-	Dana Alokasi Umum	408.246.662.000,00	421.789.650.000,00	399.397.630.000,00	490.371.763.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	28.260.000.000,00	903.700.000,00	4.525.800.000,00	424.100.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>519.568.288.310,00</b>	<b>516.442.210.171,00</b>	<b>482.799.495.953,40</b>	<b>569.671.928.953,40</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus bantuan keuangan dari provinsi. Alokasi dana lain-lain pendapatan daerah yang sah ini sangat tergantung dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2010 jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.107.392.843.979,00 atau meningkat 40,58% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp.63.812.236.081,00. Proyeksi tahun 2012 sebesar Rp.92.840.115.823,53 atau menurun 1,72% dari tahun 2011 yang ditargetkan sebesar Rp.94.441.452.137,12.

**Tabel 3.13**

Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

N O	JENIS PENDAPATAN	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012
1.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	34,226,916,081.00	38,408,877,979.00	34,466,381,137.12	34.051.044.823,53
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	16,832,805,000.00	58,668,896,000.00	58,789,071,000.00	58.789.071.000.00
3.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	12,752,515,000.00	10,315,070,000.00	1,186,000,000.00	0.00
<b>JUMLAH</b>		<b>63,812,236,081.00</b>	<b>107,392,843,979.00</b>	<b>94,441,452,137.12</b>	<b>92.840.115.823,53</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri

#### 3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan atau meliputi seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan atau pengeluaran kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun

anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja.

- a. Jika APBD surplus atau terdapat selisih positif, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas yaitu dalam bentuk deposito, giro, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- b. Jika APBD defisit atau terdapat selisih negatif, maka ditutup dari penerimaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SILPA), serta melaksanakan belanja sesuai dengan kebutuhan.

Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.14**

Realisasi Dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Kota Kediri Tahun 2009 - 2012

NO	JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	PAGU INDIKATIF TAHUN 2012
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	129.096.948.298,97	88.136.344.304,10	23.985.151.943,00	45.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>129.096.948.298,97</b>	<b>88.136.344.304,10</b>	<b>23.985.151.943,00</b>	<b>45.000.000.000,00</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah

### **3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Kediri ditujukan agar :

1. Menitikberatkan Belanja Daerah sesuai prioritas pembangunan daerah dan target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai, serta diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pemerataan Pembangunan Daerah guna peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Melanjutkan kegiatan pembangunan strategis, serta diarahkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasar kebutuhan dasar masyarakat. Kegiatan pembangunan yang bersifat fisik agar meningkatkan proporsi belanja modal.
3. Setiap belanja yang direncanakan untuk program dan kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya serta tetap berpegang pada prinsip penghematan, efisiensi dan efektivitas, serta peraturan perUndang - Undangan yang

berlaku.

4. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis kegiatan di SKPD dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa/ kajian kebutuhan tenaga pendukung yang dilakukan setiap tahun dan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota Kediri.

Pengalokasian dan penganggaran belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

#### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai dianggarkan untuk gaji, uang makan PNS maupun CPNS, serta sertifikasi guru dan tambahan penghasilan.

Realisasi belanja pegawai tahun 2010 sebesar Rp.318.844.077.073,00, meningkat 23% dari tahun 2009 sebesar Rp.258.471.219.368,62. Sedangkan proyeksi tahun 2012 sebesar Rp.401.725.316.450,00 atau meningkat 10,26% dibandingkan dengan proyeksi tahun 2011 sebesar Rp.364.353.771.450,00.

#### **2. Belanja Hibah**

Belanja hibah merupakan pengeluaran dari rekening kas daerah guna mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai instansi vertikal, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara terperinci telah ditetapkan peruntukannya

serta dilakukan secara selektif dan rasional dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pada tahun 2011 belanja hibah ditargetkan sebesar Rp.20.736.142.263,00, sedangkan realisasi tahun 2010 sebesar Rp.26.990.308.740,00. Untuk tahun 2012 belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp.28.313.083.563,00 atau naik 26,76% dari tahun 2011. Belanja hibah ini diberikan kepada lembaga olahraga, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, kelompok perempuan dan instansi vertikal.

### **3. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat berupa barang atau uang yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta dilakukan secara selektif dan tidak mengikat.

Pada tahun 2012 belanja bantuan sosial diproyeksikan sebesar Rp.15.664.778.137,47 yang diperuntukkan kepada organisasi sosial, bantuan stimulan bagi sekolah swasta mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs sampai SMA/SMK/MA serta jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk tahun 2011 belanja bantuan sosial ditargetkan sebesar Rp.23.660.202.821,52 dan tahun 2010 sebesar Rp.32.008.220.535,00 atau meningkat sebesar 20% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp.26.527.146.972,00.

#### **4. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan ini lebih diarahkan untuk mempercepat pembangunan kelurahan. Pada tahun 2012 proyeksi belanja bantuan keuangan sebesar Rp.562.886.060,00 yang antara lain dialokasikan untuk bantuan operasional kelurahan, bantuan operasional RT/RW se Kota Kediri, bantuan hadiah lomba kelurahan, bantuan stimulan pembangunan masyarakat kelurahan (SMPP) dan Jasmas. Realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun 2011 Rp.24.623.423.610,00, tahun 2010 sebesar Rp.23.534.007.608 atau mengalami penurunan sebesar 0,83% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp.23.729.872.456,00.

#### **5. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga dimaksudkan untuk belanja kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah, serta tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam program kegiatan.

Poyeksi untuk belanja tidak terduga pada tahun 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau mengalami kenaikan 100% dari anggaran tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,00.

Realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**

Realisasi Dan Proyeksi Belanja Tidak langsung  
Kota Kediri Tahun 2009 - 2012

NO	JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012
2.1.1	Belanja Pegawai	258.471.219.368,62	318.844.077.073,00	364.353.771.450,00	401.725.316.450,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	42.602.462.260,00	26.990.308.740,00	20.736.142.263,00	28.313.083.563,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	26.527.146.972,00	32.008.220.535,00	23.660.202.821,52	15.664.778.137,47
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	342.150.000,00	335.650.000,00	640.144.800,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	23.729.872.456,00	23.534.007.608,00	24.623.423.610,00	562.886.060,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	997.350.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>351.672.851.056,62</b>	<b>402.709.613.956,00</b>	<b>434.513.684.944,52</b>	<b>447.266.064.210,47</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Kota Kediri

### 3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2012 pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Kota Kediri dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal Bank Jatim sebesar Rp.1.000.000.000,00. Realisasi dan proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Kediri Tahun 2009-2012 sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.16**

Realisasi Dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Kota Kediri Tahun 2009-2012

NO	JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012
1	Penyertaan modal (investasi) daerah	6,000,000,000.00	0,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<b>J U M L A H</b>		<b>6,000,000,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Kota Kediri

### 3.5. Rekapitulasi Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Untuk mengetahui kondisi keuangan Pemerintah Daerah, baik yang terjadi sebelum tahun berkenaan (tahun 2010) maupun setelah tahun berkenaan (tahun 2012) terlebih dahulu perlu diketahui kerangka pendanaannya. Adapun kerangka pendanaan tersebut terbagi menjadi dua sisi yaitu sisi realisasi pendanaan dan sisi proyeksi pendanaan. Untuk sisi realisasi pendanaan mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Sedangkan sisi proyeksi pendanaan terdiri dari tahun berkenaan (tahun 2011) sampai dengan tahun 2012. Kerangka pendanaan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**

Realisasi Dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah  
Kota Kediri Tahun 2009-2012

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012
<b>I. PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>672.230.171.425,61</b>	<b>716.525.297.598,64</b>	<b>665.516.186.264,52</b>	<b>757.175.813.059,12</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>88.849.647.034,61</b>	<b>92.690.243.448,64</b>	<b>88.275.238.174,00</b>	<b>94.663.768.282,19</b>
-	Pajak Daerah	14.237.388.734,00	16.923.398.116,00	17.461.000.000,00	20.397.843.709,80
-	Retribusi Daerah	10.494.169.558,34	9.986.977.217,94	9.214.171.727,00	8.213.801.227,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.165.745.481,36	1.212.138.061,13	1.462.400.000,00	1.184.929.133,96
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	62.952.343.260,91	64.567.730.053,57	60.137.666.447,00	64.867.194.211,43
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>519.568.288.310,00</b>	<b>516.442.210.171,00</b>	<b>482.799.495.953,40</b>	<b>569.671.928.953,40</b>
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	83.061.626.310,00	93.748.860.171,00	78.876.065.953,40	78.876.065.953,40
-	Dana Alokasi Umum	408.246.662.000,00	421.789.650.000,00	399.397.630.000,00	490.371.763.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	28.260.000.000,00	903.700.000,00	4.525.800.000,00	424.100.000,00
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>63.812.236.081,00</b>	<b>107.392.843.979,00</b>	<b>94.441.452.137,12</b>	<b>92.840.115.823,53</b>
-	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	34.226.916.081,00	38.408.877.979,00	34.466.381.137,12	34.051.044.823,53
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	16.832.805.000,00	56.668.896.000,00	58.789.071.000,00	58.789.071.000,00

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012
-	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	12.752.515.000,00	10.315.070.000,00	1.186.000.000,00	0,00
<b>II. BELANJA DAERAH</b>		<b>707.190.775.420,48</b>	<b>637.484.894.730,62</b>	<b>688.501.338.207,52</b>	<b>800.175.813.059,12</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>351.672.851.056,62</b>	<b>402.709.613.956,00</b>	<b>434.513.684.944,52</b>	<b>447.266.064.210,47</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	258.471.219.368,62	318.844.077.073,00	364.353.771.450,00	401.725.316.450,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	42.602.462.260,00	26.990.308.740,00	20.736.142.263,00	28.313.083.563,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	26.527.146.972,00	32.008.220.535,00	23.660.202.821,52	15.664.778.137,47
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	342.150.000,00	335.650.000,00	640.144.800,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	23.729.872.456,00	23.534.007.608,00	24.623.423.610,00	562.886.060,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	997.350.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>355.517.924.363,86</b>	<b>312.332.129.524,29</b>	<b>253.987.653.263,00</b>	<b>352.909.748.848,65</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(34.960.603.994,87)</b>	<b>(1.483.554.118,35)</b>	<b>(22.985.151.943,00)</b>	<b>(43.000.000.000,00)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	129.096.948.298,97	88.136.344.304,10	23.985.151.945,00	45.000.000.000,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>129.096.948.298,97</b>	<b>88.136.344.304,10</b>	<b>23.985.151.945,00</b>	<b>45.000.000.000,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan modal (investasi) daerah	6.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3	Pembayaran pokok utang	0,00	51.952.500,00	0,00	0,00
4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>6.000.000.000,00</b>	<b>51.952.500,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>123.096.948.298,97</b>	<b>88.084.391.804,10</b>	<b>22.985.151.943,00</b>	<b>43.000.000.000,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (S I L P A)</b>		<b>88.136.344.304,10</b>	<b>89.567.945.922,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan halaman 107 sampai dengan halaman 109 Proyeksi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Pendanaan Program Menurut SKPD Kota Kediri Tahun 2012 diubah sebagai berikut :

**Tabel 5.2**

Proyeksi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2012

<b>REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>757.175.813.059,12</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>94.663.768.282,19</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	20.397.843.709,80
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.213.801.227,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.184.929.133,96
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.867.194.211,43
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>569.671.928.953,40</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	78.876.065.953,40
1.2.2	Dana Alokasi Umum	490.371.763.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	424.100.000,00
1.3	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>92.840.115.823,53</b>
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.051.044.823,53
1.3.1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	58.789.071.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>800.175.813.059,12</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>447.266.064.210,47</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	401.725.316.450,00
2.1.4	Belanja Hibah	28.313.083.563,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.664.778.137,47
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	562.886.060,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>352.909.748.848,65</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	56.959.990.356,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.382.876.487,00
2.2.3	Belanja Modal	171.566.882.005,65
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(43.000.000.000,00)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>43.000.000.000,00</b>
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>45.000.000.000,00</b>
3.1.1	SILPA tahun sebelumnya	45.000.000.000,00
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Hutang	

**Tabel 5.3**  
Rencana Pendanaan Program Menurut SKPD  
Kota Kediri Tahun 2012

<b>NO</b>	<b>S K P D</b>	<b>PAGU INDIKATIF (Rp)</b>
1	DINAS PENDIDIKAN	17.412.973.000,00
2	SMPN 1	604.052.000,00
3	SMPN 2	495.370.000,00
4	SMPN 3	515.000.000,00
5	SMPN 4	803.403.000,00
6	SMPN 5	499.724.000,00
7	SMPN 6	499.657.000,00
8	SMPN 7	499.144.000,00
9	SMPN 8	501.387.000,00
10	SMAN 1	505.970.000,00
11	SMAN 2	580.970.000,00
12	SMAN 3	529.271.000,00
13	SMAN 4	612.646.000,00
14	SMAN 5	628.996.000,00
15	SMAN 6	520.316.000,00
16	SMAN 7	560.682.000,00
17	SMAN 8	530.271.000,00
18	SMKN 1	1.857.136.000,00
19	SMKN 2	936.219.000,00
20	SMKN 3	944.576.000,00
21	KPA PENGELOLAAN DANA BOS	14.550.775.000,00
22	DINAS KESEHATAN	14.462.332.000,00
23	RSUD GAMBIRAN	52.889.306.556,00
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	133.752.074.600,00
25	DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	11.382.607.500,00
26	BAPPEDA	5.092.669.000,00
27	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.148.586.300,00
28	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	1.041.762.500,00
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	2.323.535.000,00
30	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	1.462.314.000,00

<b>NO</b>	<b>S K P D</b>	<b>PAGU INDIKATIF (Rp)</b>
31	DINAS SOSIAL DAN TENAGAKERJA	3.134.410.000,00
32	DINAS KOPERASI DAN UMKM	1.472.850.000,00
33	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OR	2.610.753.567,65
34	KANTOR KESBANGLINMAS	317.612.000,00
35	SATPOL PP	1.314.675.000,00
36	BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM	4.991.301.000,00
37	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1.469.972.750,00
38	BAGIAN ADM. KESRA	3.120.339.000,00
39	BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	799.226.000,00
40	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	432.500.000,00
41	BAGIAN PDE	330.000.000,00
42	BAGIAN HUKUM	1.067.626.000,00
43	BAGIAN ORGANISASI	1.026.157.000,00
44	BAGIAN UMUM	6.003.425.000,00
45	SEKRETARIAT DPRD	15.350.000.000,00
46	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	18.119.177.000,00
47	INSPEKTORAT	1.580.388.000,00
48	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.130.898.000,00
49	KECAMATAN PESANTREN	4.519.898.950,00
50	KECAMATAN KOTA	3.655.095.500,00
51	KECAMATAN MOJOROTO	3.158.395.325,00
52	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	483.546.000,00
53	KANTOR KETAHANAN PANGAN	482.250.000,00
54	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.069.940.000,00
55	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	503.388.000,00
56	DINAS PERTANIAN	1.671.673.300,00
57	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, TAMBEN	950.526.000,00
<b>J U M L A H</b>		<b>352.909.748.848,65</b>

4. Lampiran I dan II diubah sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI

Pada tanggal 28 Desember 2011

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**

**ttd**

**AGUS WAHYUDI**

**BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 56**